

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kinerja keuangan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangannya dengan baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Kurniawati, 2016:735). Oleh sebab itu dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan karena selama ini organisasi sektor publik dianggap sebagai sarang inefisiensi, dan pemborosan dana. Pengukuran kinerja juga bertujuan memantau dan mengevaluasi serta mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi. Selain itu juga dapat memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan objektif. Kinerja keuangan sektor publik merupakan bentuk akuntabilitas organisasi yang memenuhi tanggung jawab dan fungsi yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah untuk menggunakan anggaran. Kinerja suatu pemerintah tidak dilihat dari *output* yang dihasilkannya, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan

*outcome* secara bersamaan (Gabriella,Wuwungan 2016; 354:361). Di era pembangunan ekonomi, masyarakat semakin cerdas dan kritis serta menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, maka kebutuhan untuk mendorong pengukuran kinerja penyelenggara negara yang menerima amanat rakyat semakin meningkat.

Bagi pemerintah daerah pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Pengukuran kinerja yang digunakan salah satunya dengan analisis *Value For Money*. Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur 3 (tiga) elemen utama, yaitu: Ekonomi, efisien dan efektivitas. Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian oleh I.R.A. Polli. Dkk (2020), Yanda. Dkk (2022), Yulia Sari. Dkk (2022) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara ekonomi, efisien dan efektivitas. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah adalah *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2018 ; 142) *value for money* merupakan konsep pengelolaan yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah, ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources*

yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program atau target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Alasan peneliti ingin meneliti menggunakan pendekatan *value for money* karena peneliti ingin melihat sejauh mana keefektivan, ekonomis dan efisiensi dalam penggunaan dana Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebelumnya dinamakan BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pisah dan bentuklah Badan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, Badan Keuangan Daerah ( BKD ) mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.1.**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT**  
**Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019-2022**

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
			KEGIATAN		
Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan, serta partisipatif.	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	2019	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa	Rp 522.650.500	Rp 502.832.900
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Rp. 3.114.919.400	Rp. 3.056.076.500
			Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 2.896.105.000	Rp.2.878.283.300
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 865.373.000	Rp 861.533.300
			Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Rp. 1.207.208.000	Rp.1.176.124.390
			Penelitian, penetapan, dan Penerbitan DPA dan DPPA	Rp.787.500.000	Rp.770.558.137
			Pengendalian dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 534.900.000	Rp.516.387.950
			Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 1.474.600.000	Rp. 1.465.189.900
			Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantua Keuangan.	Rp. 855.028.600	Rp.844.240.133
			Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 125.000.000	-
			Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 318.934.400	Rp. 318.350.400
			Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB )	Rp. 1.563.118.000	Rp.1.547.319.235
			Penyusunan Dokumen KUA PPAS	Rp.631.714.000	Rp. 628.774.800
			Pengembangan implementasi sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Rp. 263.986.000	Rp.237.595.100
			Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/ Kota dan Rancangan Peraturab Kepala Daerah Tentang penjabarabn APBD Kab/ Kota dan Perubahan APBD Kab/ Kota	Rp. 570.000.000	Rp.544.388.150
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp. 340.000.000	Rp.331.301.800
			Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Rp 586.089.000	Rp 555.041.400
			Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	Rp.124.457.000	Rp 120.619.200
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab / Kota	Rp. 1.161.752.000	Rp1.115.853.000			
Pengelolaan	Persentase		Pengelolaan Anggaran Daerah	Rp 14.063.285.000	Rp. 13.283.758.331

keuangan Daerah	penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	2020	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 3.591.382.400	Rp. 3.471.140.900
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Rp. 4.442.031.700	Rp. 4.412.289.150
			Pembinaan Keuangan Kabupaten atau kota	Rp. 3.727.147.312	Rp. 3.423.449.090
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang undangan	2021	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 10.384.601.380	Rp. 9.495.761.985
			Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten atau kota	Rp. 3.256.166.200	Rp. 3.013.373.900
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 2.998.724.740	Rp. 2.936.279.698
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 4.684.935.850	Rp. 4.429.658.499
			Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.964.798.805.221	Rp. 598.928.993.722
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang undangan	2022	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 10.676.307.956	Rp. 9.181.777.624
			Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten atau kota	Rp. 3.540.802.300	Rp. 3.460.618.098
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 3.065.821.800	Rp. 3.027.692.868
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 3.712.951.700	Rp. 3.675.762.537
			Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.782.601.611.763	Rp.569.751.688.816

Sumber : LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Pada tabel 1.1. menjelaskan bahwa Laporan kinerja instansi Pemerintahan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTT meliputi pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada suatu instansi pemerintahan secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Pada program pengelolaan keuangan daerah, terlihat bahwa tidak semua kegiatan dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ada juga kegiatan dari program tersebut yang tidak dijalankan. Hal ini menunjukkan Badan

Keuangan Daerah kurang mampu mengelola anggaran yang ada demi tercapainya suatu program.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019-2022”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019-2022 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui serta mengukur kinerja keuangan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *Value For Money*.

b. Bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan pertimbangan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Daerah.

d. Bagi Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.